BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Proklamasi kemerdekaan gerakan separatis Republik Maluku Selatan bukanlah keinginan atau aspirasi seluruh masyarakat Maluku, Pada dasarnya Gerakan separatis RMS muncul akibat adanya peluang yang muncul untuk memanfaatkan isu perbedaan etnis dan ketimpangan distribusi kesejahteraan yang juga didukung oleh faktor historis dimana penjajahan Belanda ikut berpengaruh didalamnya lewat politik "pecah belah" yang ditanamkan pada masa penjajahannnya. Hal tersebut juga didukung oleh kepentingan beberapa tokoh-tokoh daerah yang merasa terancam posisinya apabila Maluku bergabung dengan RIS, sehingga terciptanyalah RMS.

Pada awal munculnya RMS sampai sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa Belanda selalu berada dibaliknya, Keberadaan aktivis dan pemerintahan RMS di negara kincir angin tersebut dapat diartikan sebagai dukungan walaupun tidak diakui secara langsung oleh Belanda. Kebebasan yang diberikan Belanda terhadap RMS membuat gerakan separatis ini sampai sekarang masih eksis dan terus melancarkan aksi penentang terhadap pemerintah Indonesia. Keadaan inilah yang akan berdampak bagi hubungan luar negeri Indonesia-Belanda kedepannya, dimana hubungan kedua negara tersebut akan selalu berada dibawah bayang-bayang masa lalu. Hubungan bilateral kedua negara ini tidak akan selamanya berjalan baik karena Belanda tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia, dengan membiarkan RMS berkeliaran bebas dan mengadakan pemerintahan dinegaranya.

Dengan adanya RMS dinegeri kincir angin tersebut akan membuat Indonesia dan belanda sulit menemukan babak baru dalam hubungannya, dimana Indonesia akan selalu berada dibawah bayang-bayang Belanda karena faktor sejarah yang lebih dominan.

Keberadaan RMS di belanda juga mencerminkan ketidak hormatan Belanda terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang mana Maluku telah merupakan harga mati termasuk dalam Negara Kesatuan Rpublik Indonesia (NKRI). Dan apabila masalah RMS belum dapat dituntaskan sampai pada akarnya baik oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, bukan tidak mungkin bahwa suatu saat RMS akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hubungan kedua negara tersebut.

RMS bukanlah sebuah kelompok yang dilengkapi dengan persenjataan untuk siap berperang dan memperoleh kemerdekaan tetapi mereka mempunyai kekuatan lewat rencana dan aksi yang siap dijadikan senjata untuk menentang pemerintah Indonesia. Apa lagi lewat isu internasionalisasi gerakan dimana Indonesia akan lebih susah ikut berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karenanya, pemberantasan gerakan separatis RMS yang hanya mengandalkan kekerasan militer maupun diplomasi omong kosong, tampaknya tidak akan pernah membuahkan hasil. Upaya memperlemah munculnya gerakan separatis RMS tersebut adalah dengan langkah meminimalisasikan faktor-faktor pemicu munculnya gerakan separatis tersebut, yakni distribusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan reorientasi pembangunan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan gerakan separatis RMS ini :

Pertama, Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia telah dilalui dengan sangat berat, baik perjuangan fisik maupun diplomasi. Berbagai pertempuran antara tentara dan rakyat Indonesia dengan tentara Belanda terjadi di mana-mana. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat dengan wilayah meliputi bekas daerah jajahan Belanda, telah terpecah-pecah oleh politik devide et impera Belanda. Yang berakibat munculnya berbagai pemberontakan lokal radikal atau gerakan separatis khususnya Republik Maluku Selatan (RMS), masalah ini tampaknya menjadi bukti nyata rasa

kebangsaan yang memudar dan sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia sebagai kesatuan entitas dalam sebuah negara-bangsa. Untuk itu perlu adanya pemantapan keamanan dalam negeri yang dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan, seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan separatisme. Kemudian pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Kedua, Keberadaan dan eksistensi gerakan separatis RMS di Belanda akan berdampak pada Hubungan luar negeri Indonesia-Belanda, walaupun pada masa sekarang belum memberikan dampak yang signifikan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat RMS akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hubungan luar negeri Indonesia-Belanda, berbagai rencana dan aksi yang dilakukan oleh RMS pada masa mendatang belum dapat ditebak, tetapi sebelum hal itu terjadi perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah RMS ini sampai ke akarnya. RMS bukanlah kelompok yang harus ditangani dengan kekuatan militer yang ujung-ujungnya akan menimbulkan pelanggaran HAM, tetapi cukup dengan melalui *soft diplomacy,* duduk bersama menyelesaikan inti dari permasalahan tersebut, dan RMS yang tadinya mungkin keras akan menjadi lunak.

Ketiga, Dalam masalah separatis ini, Indonesia mengalami hal yang lebih serius dibandingkan negara-negara lain didunia, salah satunya yaitu dengan menangani kelompok separatis RMS, Ada beberapa alasan yang membuat Indonesia relatif rapuh menghadapi gerakan separatis dibandingkan isu serupa di negara-negara lain. Pertama, karena etnis

Indonesia yang rawan untuk menuntut kemerdekaan memang berjumlah lebih banyak ketimbang etnis di negara-negara lain. Kedua, adanya strategi internasionalisasi terhadap isu separatis. Ketiga, lemahnya pemerintah Indonesia baik didalam negeri maupun ditingkat internasional dalam menghadapi soal ini. Indonesia tidak hanya harus berhadapan dengan berbagai etnis yang rentan dengan isu separatis tetapi kelompok ini juga seperti halnya RMS memiliki akses yang luas dengan berbagai fasilitas jauh lebih baik. Tentu saja hal ini yang membuat mereka menjadi pandai. Kepandaian dan kesempatan inilah yang digunakan untuk menggelindingkan isu separatisme yang bermuara pada kemerdekaan. Hal yang sangat rawan terhadap bangsa Maluku Selatan serta etnis lainnya.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti banyak menemukan kekurangan baik karena keterbatasan kapabilitas peneliti, maupun kendala – kendala non teknis. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin memberi saran, yaitu :

Pertama, Dalam proses kerjasama atau hubungan bilateral antara kedua negara, butuh adanya saling menghormati dan saling mengharagai satu sama lain agar hubungan luar negeri kedua negara dapat berjalan harmonis kedepannya. Hal ini juga yang harus ditekankan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda, kebebasan yang diberikan Belanda kepada gerakan separatis RMS dinegaranya, sama halnya dengan tidak menghormati kemerdekaan dan kedaultan bangsa. Walaupun dalam konteks ini Belanda adalah sebuah negara bebas, kelompok apa saja dapat berperan aktif didalamnya, tetapi apabila sudah menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah Indonesia baiknya harus mengeluarkan kebijakannya untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya "internasionalisasi" isu separatis RMS, pemerintah Indonesia dituntut untuk juga dapat menerapkan diplomasi publikyang efektif dalam mendorong simpati masyarakat baik nasional maupun internasional kepada pemerintah Indonesia dalam

menyelesaikan isu separatis ini. Indonesia juga harus aktif melakukan lobi intensif terhadap pemerintahan Negara lain khususnya Belanda yang menjadi basis "eksternal" gerakan separatis RMS bahwa isu separatis tersebut merupakan isu dalam negeri Indonesia dan meyakinkan bahwa tahap-tahap penyelesaian sedang dilakukan.

Kedua, Selain melakukan hal tersebut, pemerintah Indonesia harus juga melakukan hal-hal fundamental yang menjadi dasar lahirnya gerakan separatis RMS tersebut, seperti keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil di Maluku merupakan kunci pokok dalam membungkam gerakan separatis RMS. Dalam sejarahnya, munculnya berbagai gerakan yang dicap sebagai separatis merupakan dampak dari pembangunan yang tidak adil dengan ketimpangan kesejahteraan. Ketika hal tersebut dikaitkan dengan atribut etnis, kedaerahan, bahkan agama, hal tersebut tampaknya menjadi senjata yang ampuh bagi separatis dalam melakukan doktrinasi terhadap masyarakat umum untuk menentang negara. Namun, ketika kesejahteraan tersebut dapat terpenuhi, maka akan sulit bagi aktor-aktor gerakan separatis untuk mencari celah dalam mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk perlawanannya melawan negara. Oleh karenanya, gerakan-gerakan perlawanan separatisme itu janganlah sekedar dilihat secara hitam-putih sebagai bentuk anti-nasionalisme. Karena, mungkin saja, gerakan tersebut merupakan pengingatan bagi pemerintah atas ketidakadilan pembangunan kesejahteraan yang dilakukan selama ini.

Ketiga, Yang berikut pemerintah Indonesia tidak hanya lamban tetapi juga represif dalam menghadapi gerakan separatis seperti RMS. Dua hal ini dapat memposisikan Indonesia pada posisi kalah. RMS tidak akan pernah mati apabila solusinya tidak tepat. Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Isu separatis justru muncul di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tetapi tidak mendapatkan perhatian yang pantas. Otonomi daerah masih setengah hati dan orang daerah masih menjadi penonton bagi pemanfaatan sumber daya alam mereka. Kemudian reorientasi

pembangunan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia merupakan hal penting dalam penjagaan keutuhan nasional sebagai upaya meredupkan isu-isu separatisme sebagai contoh RMS. Langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi pendidikan sebagai pembentukan kader-kader bangsa yang militan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga melalui agenda pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah (1) pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah; (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi; (4) mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme; (5) melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya; (6) menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; dan (7) menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.